



Penerapan Akuntansi Keberlanjutan Berbasis ESG dalam Pengidentifikasian Tanggung Jawab Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya

Elisabeth Lauboling^{1*}, Marlinda Ina², Sirilia S.J Ruben³, Titiek Rachmawati⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: ellbolingg@gmail.com¹, Marlindaina48@gmail.com², siriliaruben@gmail.com³,

titiekrachmawati@untag-sby.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: ellbolingg@gmail.com

Abstract. *The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG)-based sustainability accounting is gaining increasing attention in the public sector as an effort to strengthen transparency and accountability, particularly in environmental management. This study aims to examine how ESG-based sustainability accounting is applied in identifying environmental responsibilities at the Surabaya City Public Works and Highways Agency. The research used a qualitative approach, with data collection methods including interviews, observations, and documentation studies. The research findings indicate that the application of ESG principles in financial management and operational activities is still in its early stages of development, particularly in environmental reporting. Efforts to identify environmental responsibilities have been implemented through various sustainable development programs, but they have not been optimally integrated into the existing accounting system. Several obstacles encountered include limited technical regulations, a lack of competent human resources, and the absence of uniform reporting standards. Therefore, strengthening policies and developing an ESG-based accounting system is necessary to enhance environmental accountability and support sustainable infrastructure development in Surabaya.*

Keywords: *Environmental Responsibility; Environmental; Highways; Public Sector; Sustainability Accounting.*

Abstrak. Implementasi akuntansi keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin memperoleh perhatian dalam sektor publik sebagai salah satu upaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan aspek lingkungan. Penerapan konsep ESG dinilai penting karena mampu mendukung terciptanya pembangunan yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam pengelolaan keuangan maupun aktivitas operasional pada instansi pemerintah masih berada pada tahap awal pengembangan, terutama dalam aspek pelaporan dan pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Upaya identifikasi tanggung jawab lingkungan sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan dan kegiatan operasional yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaan tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem akuntansi yang berlaku sehingga informasi terkait tanggung jawab lingkungan belum tersaji secara menyeluruh dan sistematis. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi teknis, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ESG, serta belum adanya standar pelaporan yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengembangan sistem akuntansi berbasis ESG guna meningkatkan akuntabilitas lingkungan serta mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kota Surabaya.

Kata kunci: Akuntansi Keberlanjutan; Bina Marga; *Environmental*; Sektor Publik; Tanggung Jawab Lingkungan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun belakanya, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin maju sebagai strategi utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. ESG tidak hanya menekankan tanggung jawab sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana organisasi mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa organisasi, baik swasta maupun publik, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kegiatannya (KPMG, 2020). Bersamaan dengan itu, akuntansi keberlanjutan juga berkembang, dari sekadar alat pelaporan tanggung jawab sosial

menjadi instrumen kunci untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada keberlanjutan (Gray, 2010; Emiati & Cahyadi, 2025).

Isu keberlanjutan kini tidak hanya menjadi perhatian korporasi, tetapi juga prioritas utama pemerintah. Pemerintah diharuskan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan dan programnya memperhatikan dampak sosial serta lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam pengintegrasian prinsip keberlanjutan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta partisipasi aktif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah daerah berperan penting sebagai pelaksana kebijakan lokal. Oleh karena itu, instansi pemerintah daerah perlu mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Realitas empiris menunjukkan bahwa sektor pembangunan infrastruktur masih menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Aktivitas konstruksi, khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan, berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, tingginya konsumsi sumber daya alam, serta produksi limbah konstruksi yang belum sepenuhnya dikelola secara optimal (Arifin et al., 2025). Di Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan, pembangunan infrastruktur terus meningkat untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya polusi udara, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta bertambahnya volume limbah konstruksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, instansi pemerintah daerah masih cenderung berfokus pada pencapaian target pembangunan fisik, sementara aspek pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek pembangunan dengan pengelolaan dampak lingkungan secara terukur dan akuntabel. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG.

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak aktivitas organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam sektor publik, penerapan ESG juga berpotensi

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Aktivitas yang dilakukan memiliki potensi signifikan terhadap lingkungan, terutama terkait emisi, penggunaan material konstruksi, serta pengelolaan limbah. Apabila tidak dikelola secara optimal, aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi ESG di sektor publik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum tersedianya standar baku penerapan ESG pada instansi pemerintah daerah, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan keberlanjutan dengan sistem akuntansi yang ada. Hal ini menyebabkan penerapan ESG belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dalam mengidentifikasi tanggung jawab lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi penerapan ESG serta menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan praktik keberlanjutan di sektor publik.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan konsep akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dalam aktivitas pengelolaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya?
- b. Bagaimana cara instansi tersebut dalam mengidentifikasi bentuk tanggung jawab lingkungan yang timbul dari kegiatan operasionalnya?
- c. Bagaimana penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mendukung proses identifikasi dan penilaian dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur jalan?
- d. Bagaimana hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan konsep akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dalam aktivitas pengelolaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya.

- b. Untuk mengetahui cara instansi dalam mengidentifikasi bentuk tanggung jawab lingkungan yang timbul dari kegiatan operasionalnya.
- c. Untuk mengkaji penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mendukung proses identifikasi serta penilaian dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur jalan.
- d. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, terutama akuntansi keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di sektor publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya serta pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan ESG, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengelola tanggung jawab lingkungan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik akuntansi keberlanjutan dan ESG.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan merupakan pengembangan dari akuntansi konvensional yang tidak hanya menekankan aspek keuangan, tetapi juga meliputi aspek lingkungan dan sosial. Menurut Gray (2010) akuntansi keberlanjutan adalah proses pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban atas kinerja organisasi terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemangku kepentingan guna mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, akuntansi keberlanjutan mencakup pelaporan yang terintegrasi antara kinerja keuangan dan nonkeuangan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih transparan dalam mengungkapkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, akuntansi keberlanjutan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Kerangka Integratif ESG, Akuntansi Keberlanjutan, dan SDGs

Integrasi antara ESG dan akuntansi keberlanjutan menciptakan sinergi strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. ESG bertindak sebagai pedoman dalam evaluasi risiko dan peluang keberlanjutan, sedangkan akuntansi keberlanjutan menjadi mekanisme kuantifikasi dan pelaporan atas kinerja keberlanjutan perusahaan. Menurut survei KPMG (2022), semakin banyak perusahaan global yang mengadopsi pelaporan berbasis SDGs dan ESG dalam laporan keberlanjutan mereka sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholder*.

Akuntansi Berbasis ESG di Sektor Publik

Penerapan akuntansi berbasis ESG di sektor publik merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan dan program yang dijalankan.

Menurut beberapa penelitian, penerapan ESG di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman sumber daya manusia, serta belum adanya standar pelaporan yang baku. Namun demikian, penerapan ESG tetap menjadi penting karena dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Lingkungan

Tanggung jawab lingkungan merupakan kewajiban organisasi untuk mengelola dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, pengurangan emisi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pelestarian lingkungan.

Dalam konteks sektor publik, tanggung jawab lingkungan menjadi semakin penting karena pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan secara sistematis agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar di masa depan.

Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Lingkungan

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, di sisi lain, kegiatan ini juga memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta timbulnya limbah konstruksi. Oleh karena itu,

diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dapat menjadi salah satu solusi dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak tersebut secara lebih sistematis.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis di atas, dapat dipahami bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG berperan penting dalam mengidentifikasi tanggung jawab lingkungan, khususnya pada sektor publik. Dalam penelitian ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya menjadi objek penelitian dalam melihat bagaimana implementasi ESG dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mengidentifikasi tanggung jawab lingkungan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya.. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai proses, kebijakan, perilaku organisasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip keberlanjutan di sektor publik.

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan serta memahami makna di balik kebijakan dan tindakan yang dilakukan instansi dalam mengelola aspek lingkungan. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mengandung analisis kritis terhadap kesenjangan antara konsep ideal akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dan praktik yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya. Peneliti berupaya mengidentifikasi tidak hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, termasuk berbagai kendala seperti keterbatasan regulasi teknis di tingkat daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta dominasi paradigma akuntansi konvensional yang masih berfokus pada aspek keuangan.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pengungkapan aspek-aspek yang tidak tampak dalam laporan formal di lingkungan Dinas Bina Marga, seperti budaya organisasi, tingkat komitmen pimpinan terhadap isu lingkungan, serta efektivitas koordinasi antarbidang dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan infrastruktur. Analisis data dilakukan secara tematik dan triangulatif untuk meningkatkan

validitas temuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris terkait praktik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya, tetapi juga kontribusi kritis bagi pengembangan akuntansi sektor publik serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam memperkuat implementasi ESG secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya menunjukkan bahwa instansi ini memegang peran krusial dalam pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan di kawasan kota. Kegiatan mereka tidak hanya melibatkan pembangunan fisik semata, melainkan juga berdampak pada lingkungan, seperti penambahan emisi gas, penggunaan bahan alam, serta produksi limbah dari proyek konstruksi. Karenanya, akuntansi keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sangat tepat untuk menggabungkan pertimbangan lingkungan ke dalam pengelolaan organisasi secara lebih menyeluruh.

Meski begitu, hasil studi mengungkap bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG di dinas tersebut masih dalam tahap permulaan dan belum optimal.

Penerapan prinsip ESG belum terstruktur dalam sistem akuntansi yang berlaku, melainkan masih tercermin secara tidak langsung melalui pelaksanaan program kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ESG belum dijadikan sebagai kerangka utama dalam pengelolaan organisasi, melainkan masih bersifat tambahan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada aspek keuangan, sehingga dimensi lingkungan belum terakomodasi secara memadai dalam pelaporan organisasi.

Dalam hal pengidentifikasian tanggung jawab lingkungan, instansi telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan operasional, seperti pengelolaan drainase, pemeliharaan jalan, pengelolaan limbah konstruksi, serta penggunaan material secara efisien. Meskipun demikian, upaya tersebut cenderung bersifat teknis dan belum didukung oleh sistem pencatatan akuntansi yang terintegrasi. Tidak adanya klasifikasi khusus terkait biaya lingkungan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa konsep akuntansi biaya lingkungan belum diterapkan secara optimal. Akibatnya, dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan belum dapat diukur secara kuantitatif maupun dievaluasi secara sistematis.

Jika ditinjau dari perspektif ESG, penerapan aspek *Environmental* masih terbatas pada pelaksanaan program tanpa disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi terhadap efektivitas program lingkungan yang telah

dijalankan. Pada aspek sosial, meskipun kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas dan kelancaran mobilitas, namun penilaian terhadap dampak sosial tersebut belum dilakukan secara sistematis. Sementara itu, dari aspek *Governance*, instansi telah menjalankan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada tata kelola yang berbasis keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip ESG dalam tata kelola organisasi belum sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara konsep ideal akuntansi keberlanjutan berbasis ESG dengan praktik yang diterapkan di lapangan. Secara konseptual, ESG seharusnya menjadi kerangka yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh proses organisasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Akan tetapi, dalam praktiknya, ESG belum menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan strategis. Hal ini menyebabkan pengelolaan dampak lingkungan masih dilakukan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh.

Hambatan dalam penerapan ESG tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya organisasi. Ketiadaan regulasi teknis yang spesifik terkait ESG di sektor publik menyebabkan instansi belum memiliki pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi keberlanjutan menjadi kendala utama. Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan bahwa keberhasilan pembangunan lebih diukur dari pencapaian output fisik, bukan dari kualitas keberlanjutan yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan menuju penerapan ESG memerlukan transformasi tidak hanya pada sistem, tetapi juga pada pola pikir organisasi.

Secara kritis, kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa penerapan ESG di Dinas Bina Marga masih berada pada tahap simbolis, yaitu sebatas menunjukkan adanya perhatian terhadap isu lingkungan, namun belum diikuti dengan implementasi yang mendalam dan terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih komprehensif, seperti pengembangan sistem akuntansi berbasis ESG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya peluang untuk pengembangan penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG di masa yang akan datang. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran awal terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan serta keberadaan program-program yang mendukung keberlanjutan. Dengan dukungan kebijakan

yang lebih kuat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi sistem pelaporan yang lebih baik, penerapan ESG di sektor publik, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya, berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya masih berada pada tahap awal perkembangan dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem akuntansi organisasi. Implementasi prinsip keberlanjutan yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan operasional, serta belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan maupun pengambilan keputusan strategis. Jika ditinjau dari masing-masing dimensi ESG, aspek lingkungan masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan teknis tanpa didukung indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pada aspek sosial, meskipun pembangunan infrastruktur memberikan manfaat bagi masyarakat, pengukuran dampaknya belum dilakukan secara sistematis. Sementara itu, aspek tata kelola masih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga belum mencerminkan praktik *governance* yang berbasis keberlanjutan. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara konsep ESG secara teoritis dengan implementasinya di tingkat instansi.

Selain itu, belum diterapkannya akuntansi biaya lingkungan dalam sistem yang ada menyebabkan instansi belum mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dominasi pendekatan akuntansi konvensional yang menitikberatkan pada aspek keuangan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses transformasi menuju akuntansi keberlanjutan.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan ESG bersifat kompleks, meliputi belum adanya regulasi teknis yang jelas, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran institusional terhadap pentingnya isu keberlanjutan. Di samping itu, orientasi organisasi yang masih menitikberatkan pada pencapaian output fisik turut memperlambat adopsi pendekatan berbasis *sustainability*. Meskipun demikian, terdapat peluang yang dapat dikembangkan ke depan, yang ditunjukkan dengan mulai munculnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem akuntansi yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial

secara lebih komprehensif. Dengan langkah tersebut, penerapan ESG di sektor publik diharapkan dapat berkembang dari sekadar formalitas menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendorong penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG agar lebih optimal di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya. Pertama, perlu adanya aturan dan kebijakan yang lebih jelas dan spesifik terkait penerapan ESG di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya pedoman yang terarah, instansi akan lebih mudah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam sistem kerjanya. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Aparatur perlu dibekali melalui pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi agar mampu memahami dan menerapkan konsep ESG, khususnya dalam mengidentifikasi serta melaporkan dampak lingkungan dan sosial. Ketiga, sistem akuntansi yang ada perlu dikembangkan agar mampu mengakomodasi prinsip ESG. Hal ini bisa dimulai dengan pengelompokan biaya lingkungan, penyusunan indikator kinerja keberlanjutan, serta memasukkan aspek non-keuangan ke dalam laporan organisasi. Keempat, instansi juga perlu memiliki indikator yang jelas dan terukur, terutama untuk aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya indikator ini, kinerja keberlanjutan dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terarah. Kelima, diperlukan perubahan cara pandang dalam organisasi. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari hasil fisik pembangunan, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan komitmen pimpinan serta kerja sama yang baik antar bagian. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas, misalnya dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan antar instansi. Dengan begitu, bisa diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih aplikatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Prakoso, H. B. (2023). Implementasi *green accounting* dalam mendukung keberlanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–158.
- Antonetta, C. D., & Simon, F. (2026). Pengaruh pengungkapan lingkungan, sosial, dan tatakelola (ESG) dan *green accounting* terhadap nilai perusahaan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 559–570.
- Arifin, M., Pratomo, Y. A., & Rahmadani, N. (2025). Regulasi dan perkembangannya dalam sektor publik. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital*, 2(3), 40–48. <https://doi.org/10.61132/jubid.v2i2.610>
- Ariyani, L., Vadstena, B. A., & Elbert, B. (2023). Laporan ESG: Peran baru perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. *Proceeding Accounting Skill Competition*, 2(1), 88–119.
- Awanda, D. W. P., & Bayangkara, I. B. K. (2025). Akuntansi keberlanjutan dan pengungkapan ESG pada PT Unilever Indonesia dan PT Pertamina sebagai perusahaan pemenang ASRRAT. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(1), 15–25.
- Elza, P. (2025). Implementasi prinsip ESG dalam membangun bisnis berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 39–48.
- Emiati, R. F., & Cahyadi, A. (2025). Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam JII 70. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4), 56–70. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i4.2277>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2022). Pengungkapan ESG dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 34–46.
- Hidayah, N., Kathryna, N., Manoppo, S. N., Apriliani, A., & Pariyanti, A. B. (2025). Redefinisi strategis peran akuntan sebagai agen perubahan dalam implementasi *green accounting* di perusahaan berbasis ESG. *Journal of Capital Markets and Banking*, 13(3), 55–64.
- Kusuma, M. A., & Lestari, D. P. (2024). Analisis penerapan akuntansi keberlanjutan berbasis ESG pada sektor publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(1), 77–89.
- Nugroho, T., & Puspitasari, E. (2021). Peran akuntansi lingkungan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan limbah industri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 301–312.
- Oktaria, E. T., & Sari, P. N. (2024). Tantangan dan peluang ESG (*Environmental, Social, and Governance*) reporting: Analisis literatur tentang peran akuntansi dalam pengukuran kinerja berkelanjutan perusahaan. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(1).
- Ovelia, L., & Bayangkara, I. B. K. (2025). Analisis implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan terintegrasi PT Indonesia Infrastructure Finance tahun 2023. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 124–138.
- Pramudya, R. A., & Sihombing, M. (2025). ESG reporting sebagai strategi peningkatan transparansi dan keberlanjutan perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 112–125.

- Saputra, Y., & Wijayani, R. (2023). Pengaruh penerapan *sustainability accounting* terhadap kinerja perusahaan berorientasi lingkungan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Kontemporer*, 5(1), 59–71.
- Setiawan, D., & Darmawan, I. (2022). Penerapan ESG dalam sektor publik dan implikasinya terhadap kinerja organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 78–90.
- Wibowo, A., & Handayani, S. (2019). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 567–580.
- Wulandari, A. D., & Bayangkara, I. K. (2025). Analisis ESG dalam praktik akuntansi keberlanjutan: PT Golden Energy Mines Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4244–4249.